

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis metode perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap besarnya PPh terutang PT “X” serta didukung oleh data-data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan:

1. Terdapat empat metode perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 yang dapat digunakan untuk memperhitungkan besarnya PPh pasal 21 terutang/diseter dan *take home pay* yaitu dengan cara PPh pasal 21 ditanggung oleh pegawai, PPh pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja, PPh pasal 21 diberikan dalam tunjangan pajak dan PPh pasal 21 di *gross up*. Perbandingan PPh pasal 21 berdasarkan metode yang digunakan dapat dilihat pada tabel XVIII berikut ini:

Tabel XVIII
Perbandingan PPh pasal 21 Berdasarkan Metode Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 21

Metode Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 21	PPh pasal 21 terutang selama setahun
➤ Ditanggung oleh pegawai	Rp 5.942.000
➤ Ditanggung oleh pemberi kerja	Rp 5.942.000
➤ Dalam tunjangan pajak	Rp 6.224.000
➤ Di <i>gross up</i>	Rp 6.238.000

2. Besarnya *take home pay* yang diterima oleh karyawan dengan metode perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 dapat dilihat perbandingannya pada tabel XIX berikut ini:

Tabel XIX
Perbandingan *Take Home Pay* Menurut Metode Perhitungan & Pemotongan PPh pasal 21

Metode Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 21	<i>Take Home Pay</i> Setahun
➤ Ditanggung oleh pegawai	Rp 547.858.000
➤ Ditanggung oleh pemberi kerja	Rp 553.800.000
➤ Dalam tunjangan pajak	Rp 553.517.994
➤ Di <i>gross up</i>	Rp 553.800.000

3. Alternatif perhitungan dan pemotongan yang terbaik dalam meminimalkan PPh terutang perusahaan dan yang menguntungkan karyawan adalah PPh pasal 21 di *gross up*. Alasannya adalah dari sudut pandang karyawan *take home pay* yang diperoleh dengan menggunakan metode *gross up* paling besar sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Dan dari sudut pandang perusahaan, perusahaan dapat membebaskan tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan sebagai unsur beban (*deductible expense*) dimana tunjangan tersebut merupakan penghasilan bagi karyawan yang dikenakan PPh Pasal 21.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan:

1. Kepada PT X

PT X sebaiknya menerapkan metode perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 dengan metode di *gross up*. Hal ini dikarenakan, metode perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di *gross up* lebih menguntungkan daripada metode perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan/pemberi kerja, yang selama ini diterapkan perusahaan. Metode perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di *gross up* menghasilkan selisih biaya komersial dan biaya fiskal yang paling kecil serta *take home pay* karyawan yang paling besar.

2. Kepada peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya sebaiknya memperdalam penelitian dengan tidak hanya memperhitungkan jumlah pajak terutang, *take home pay* dan selisih biaya fiskal dan biaya komersil. Tetapi juga dapat menganalisis dampak dari masing-masing metode perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 terhadap laporan keuangan perusahaan.